

# MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN

Mohamad Ahyar Ma'arif\*

## Abstract:

*In accordance with its existence, man has always bernaluri to make a change that ultimately these changes will lead to progress in the reality of life good progress in the areas of technical and mechanical. Since then, the idea to do the transfer, preservation and development of human life as an effort to revamp that goes with synergies through management within a particular organization especially pendidikan. Humans together and race each other to make a change, so management is becoming increasingly important role to deliver an educational institution in the creation of educational quality is better than before, and even can be said of management in education is the key of all forms of educational progress throughout the history of human civilization and the development of education.*

*Management is an infra structures having a very significant role in formulating the institutional arrangements for reconstruction in improving the quality and the quality of education. In practical terms, the management of education must be improved to a better direction in its relevance for educational purposes as well as local institutional national education goals.*

**Keywords:** management, education, quality

## Latar Belakang

Sesuai dengan eksistensinya, manusia selalu bernaluri untuk melakukan sebuah perubahan yang pada akhirnya perubahan tersebut akan bermuara pada kemajuan dalam realitas kehidupan baik kemajuan pada ranah teknis maupun mekanisnya. Maka sejak itu, timbul gagasan untuk melakukan pengalihan, pelestarian dan pengembangan dalam kehidupan manusia sebagai upaya pembenahan yang berjalan dengan sinergi melalui manajemen dalam suatu organisasi tertentu khususnya pendidikan. Manusia bahu-membahu dan saling berpacu untuk melakukan perubahan, sehingga manajemen menjadi semakin penting peranannya untuk mengantarkan suatu lembaga pendidikan pada terciptanya mutu pendidikan yang lebih baik dari sebelumnya, bahkan boleh dikatakan manajemen dalam pendidikan merupakan

---

\* Dosen Tetap Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan

kunci dari segala bentuk kemajuan pendidikan sepanjang sejarah peradaban manusia dan perkembangan pendidikan.

Manajemen merupakan infra struktur yang mempunyai peran sangat signifikan dalam merumuskan aturan-aturan kelembagaan untuk melakukan rekonstruksi dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan. Secara praktis, manajemen pendidikan harus ditingkatkan ke arah yang lebih baik dalam relevansinya untuk tujuan pendidikan institusional daerah maupun tujuan pendidikan nasional.

secara sederhana Manajemen mempunyai arti yang sangat luas dan bisa masuk dalam ranah ilmu lainnya. Lebih dikenal bahwa manajemen sering digunakan dalam suatu lembaga atau organisasi yang telah ada. Melihat dari sini bahwa pendidikan yang berada dalam suatu lembaga tentunya tidak bisa lepas dari manajemen atau pengelolaan untuk mengembangkan tercapainya tujuan pendidikan.<sup>1</sup>

Berbicara tentang manajemen, dewasa ini banyak yang menafsirkan istilah manajemen dengan berbagai pengertian gaya bahasa masing-masing. Maka disini dapat dijelaskan istilah manajemen menurut George R. Terry manajemen adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain. Dengan konsepnya *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*<sup>2</sup>.

Secara luas, fungsi dan manajemen berlaku dalam bidang yang sangat luas atau dalam bidang-bidang umum seperti (perusahaan, organisasi, pemerintah), karena itu sifatnya yang universal. Dalam pandangan ajaran Islam, manajemen merupakan rangkaian segala sesuatu yang mengatur kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan tujuannya dan segala sesuatu itu harus tertata secara rapi, benar, tertib dan teratur sebagaimana Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Thabrani:

ان الله يحب اذا عمل احدكم العمل ان يتقنه (رواه الطبراني)

Artinya: *Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan dilakukan secara itqan (tepat, terarah, jelas, dan teratur).*

<sup>1</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Manajemen Pengelolaan Pendidikan dan Kepemimpinan Pendidikan Professional*. (Yogyakarta: DIVA Press, 2009), 70.

<sup>2</sup> M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008), 3.

Melihat dari hadits tersebut bahwa segala sesuatu harus dilakukan dengan itqan yang penuh dengan tanggung jawab agar segala sesuatu yang kita kerjakan dapat bermanfaat dan tercapai. Oleh karena itu, bilamana manajemen kaitkan dengan rasa penuh tanggung jawab, pembagian kerja dan efisiensi. Maka hal tersebut searah dengan makna Al-Qur'an sesuai dengan Firman Allah SWT. Dalam surat Al-Zalzalah ayat 7-8.

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۗ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۗ

Artinya: *Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. Dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula.* (Q.S. Al Zalzalah: 7-8).<sup>3</sup>

Proses-proses manajemen pada dasarnya adalah perencanaan segala sesuatu yang mantap untuk melahirkan keyakinan yang berdampak pada melakukan sesuatu sesuai dengan aturan dan memiliki manfaat<sup>4</sup>. Oleh sebab itu, manajemen perlu melakukan rekonstruksi dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan.

Secara luas, pendidikan adalah hidup. Pendidikan segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjanghidup. Sedangkan secara sempit, pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal dengan segala pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap anak dan remaja yang diserahkan kepadanya agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan dan tugas sosial mereka<sup>5</sup>.

Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab 1 ayat 1 menyatakan:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan

<sup>3</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 1971, Hlm. 1087

<sup>4</sup> Mulyono, M A, *Manajemen Administrasti dan Organisasi Pendidikan*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 20.

<sup>5</sup> Dr. Binti Maunah. *Ilmu Pendidikan*. (Yogyakarta: Penerbit TERAS, 2009), 1.

dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara<sup>6</sup>. Jadi, jika mengacu pada Undang-Undang di atas, hakekatnya dari pendidikan adalah agar anak didik setelah dewasa nanti mampu melewati kehidupan dengan berbekal kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Manajemen pendidikan pada dasarnya adalah alat-alat yang diperlukan dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. Unsur manajemen dalam pendidikan merupakan penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam bidang pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan rangkaian proses yang mempunyai fungsi dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang terkait dalam bidang pendidikan<sup>7</sup>.

Dengan melihat kajian di atas, tentunya dalam pendidikan kita tidak akan bisa terpisahkan dengan manajemen yang secara langsung maupun tidak langsung digunakan mengatur proses berjalannya dalam suatu lembaga pendidikan tersebut. Manajemen merupakan sebuah pondasi yang sangat signifikan dalam merumuskan aturan-aturan kelembagaan di era otonomi daerah sekarang ini, karena manajemen yang berada dalam pendidikan sebagai supra infra struktur yang ada dalam dunia pendidikan.

Maka otonomi daerah merupakan Undang-undang No. 22 Tahun 1999, yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999. Peraturan pemerintah No 25 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang pembagian kewenangan antara pusat dan daerah otonomi membawa nuansa baru dalam sistem pengelolaan pendidikan. Nuansa baru itu antara lain berkembangnya pemikiran untuk melaksanakan desentralisasi pengelolaan pendidikan sejalan dengan otonomi daerah.

Kebijaksanaan desentralisasi yang dimulai sejak 1 Januari 2001, diawali dengan pelimpahan sebagian besar kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota)

---

<sup>6</sup> Sisdiknas. *Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003*. (Bandung: Citra Umbara, 2010), 2-3.

<sup>7</sup> Drs. Ara Hidayat, M.Pd dan Imam Machali, M.Pd. *Pengelolaan Pendidikan "Konsep, Prinsip dan Aplikasi dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah"*. (Bandung: Pustaka Eduka, 2010), 5

yang membawa konsekuensi adanya restrukturisasi kelembagaan pemerintahan, termasuk kelembagaan pendidikan.

Secara filosofis, Otonomi daerah mengandung makna pemberdayaan potensi dan masyarakat daerah sehingga memiliki kemampuan untuk mengelola semua potensi yang dimilinya secara efisien dan efektif. Namun demikian, pemberdayaan masyarakat daerah haruslah berjalan seiring dengan kepentingan regional dan nasional, serta pemanfaatan berbagai peluang yang diciptakan oleh proses global. Dalam konteks inilah, pendidikan memiliki peran strategi dalam mewujudkan cita-cita otonomi daerah tersebut dalam kerangka Negara kesatuan Replubik Indonesia<sup>8</sup>.

Desentralisasi dan pemberian otonomi luas kepada pemerintah daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu, melalui otonomi luas daerah yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam Negara Kesatuan Replubik Indonesia.

Desentralisasi juga didasarkan pada keinginan untuk menciptakan demokrasi, pemerataan, efektivitas, dan efisiensi. Implikasi langsung dari kebijakan ini adalah semua kebijakan publik harus lebih banyak berasal dari bawah/ masyarakat (*bottom-up*) dan bukan lagi dari atas yaitu pemerintah (*top-down*). Keterlibatan masyarakat, baik sebagai pelaku dan subjek dalam proses perencanaan dan pelaksanaan sampai kepada pemanfaatan sesuai yang terkait dengan publik harus demokratis dan sesuai dengan kebutuhan lingkungan masyarakat atau warga.

Penyelenggaraan desentralisasi ini mengisyaratkan pembagian urusan pemerintah antara pemerintah dengan daerah otonomi. Pembagian urusan pemerintah tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya atau tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintah tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan Negara secara keseluruhan yang meliputi persoalan politik luar negeri, ketahanan, moneter dan fiksial nasional, yustisi dan agama.

---

<sup>8</sup> Drs. H. M. Nurdin Matry. *Implementasi Dasar-Dasar Manajemen Sekolah dalam Era Otonomi Daerah*. (Yogyakarta: Aksara Madani, 2008), 2.

Selain tersebut juga terdapat bagian urusan pemerintah yang bersifat *concurrent* yaitu urusan pemerintah yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah.

Sedangkan aspek yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (propinsi) di antaranya adalah penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia. Terkait dengan kewenangan penyelenggaraan pendidikan tersebut maka pemerintah daerah telah melakukan usaha penataan pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Di antara yang telah dilakukan adalah dengan mengeluarkan peraturan daerah (perda) yang secara khusus mengatur pelaksanaan pendidikan. Perda pendidikan tersebut menjadi panduan kebijakan dalam pengelolaan pendidikan secara parsipatif, demokratis, transparan, dan akuntabel di daerah.<sup>9</sup>

Dengan demikian, maka pentingnya mengkaji peran manajemen dalam sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di era otonomi daerah, karena pendidikan yang ada harus benar-benar menjadi proyeksi untuk generasi bangsa ke depan lebih baik. Disisi lain, manajemen yang merupakan supra dari pendidikan perlu dirumuskan mulai dari konsep dan yang lainnya, upaya untuk mensinergikan kondisi pendidikan yang ada di Indonesia.

Berkenaan dengan kebijakan pelaksanaan desentralisasi pendidikan tersebut, maka ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan sekaligus direkomendasikan<sup>10</sup>, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan desentralisasi pendidikan hakikatnya lebih memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih pelayanan pendidikan sesuai dengan keinginannya, tidak ada semacam upaya mengiringi ke arah tertentu kepada masyarakat baik secara operasional maupun pola pikirnya (demokrasi pendidikan).
2. Pelaksanaan desentralisasi hendaknya bisa lebih pemeratakan pelayanan pendidikan dan rasa adil kepada masyarakat. Jangan sampai pelayanan pendidikan hanya dapat dinikmati oleh sekelompok masyarakat tertentu dengan mengorbankan kelompok

---

<sup>9</sup> Drs. Ara Hidayat, M.Pd dan Imam Machali, M.Pd. *Pengelolaan Pendidikan "Konsep, Prinsip dan Aplikasi dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah"*. (Bandung: Pustaka Eduka, 2010), 55.

<sup>10</sup> Hasbullah. *Otonomi Pendidikan "Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan"*. (Jakarta: Remaja Grafindo, 2006), 172-173.

masyarakat yang lainnya (pemerataan dan keadilan). Dalam hal ini tidak ada istilah lembaga pendidikan yang termarjinalkan, baik dari segi status maupun layanan yang diberikan.

3. Pelaksanaan desentralisasi harus mampu mengakomodasi keragaman potensi dan kondisi sosial budaya antar daerah. Dengan demikian, antar daerah kabupaten/kota yang saling berbatasan secara geografis mungkin saja pelayanan dan metode pelaksanaan pendidikannya berbeda, karena potensi sosial budaya yang berbeda. Namun, tidak menutup kemungkinan juga terdapat persamaan sehingga memudahkan untuk melakukan kerja sama.
4. Pelaksanaan sistem desentralisasi pendidikan hendaknya dapat menumbuhkan budaya bersaing dan besanding antar daerah. Jangan sampai desentralisasi pendidikan justru mematikan motivasi kreativitas sehingga tidak menumbuhkan budaya bersaing dan bersanding di masyarakat.

## PEMBAHASAN

### I. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari bahasa latin yaitu asal kata dari *Manus* yang berarti tangan dan *Agere* yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabungkan menjadi satu yaitu *Manager* yang mempunyai arti menangani. Kemudian diterjemahkan kedalam bahasa inggris manajemen yang mempunyai arti dalam bahasa Indonesia manajemen atau pengelolaan<sup>11</sup>.

Manajemen mempunyai banyak perkembangan dan pengertian dalam konteks manajemen dengan melihat objek pokok permasalahan yang kemudian akan dilakukan. Dalam *Encyclopaedia of the Social Science* terdapat tentang definisi manajemen yaitu *The proses, by which the excytion of a given purpose is put into operastioan and suporvited* dalam bahasa kita manajemen adalah proses dengan melaksanakan dari pada suatu tujuan tertentu di selenggarakan dan diawasi<sup>12</sup>.

Manajemen merupakan suatu ilmu dan seni<sup>13</sup> dalam upaya

<sup>11</sup> Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd. M.T, *Manaejemen Teori Praktek dan Riset Pendidikan*. (Jakarta Timr: PT. Bumi Aksara, 2008), 4.

<sup>12</sup> Prof. Dr. J. Panglaykim dan Drs. Hazil Tanzil. "*Manajemen Suatu Pengantar*", (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia), 1991.

<sup>13</sup> Manajemen suatu kajian ilmu, dimana manajemen merupakan teori yang

memanfaatkan sumber daya manusia dan daya lain dalam kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengawasi yang dilakukan secara efektif dan efisien dengan melibatkan peran seluruh anggota secara aktif dalam mencapai tujuan yang ditentukan<sup>14</sup>.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa manajemen adalah sebuah proses yang khas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan serta evaluasi yang dilakukan pihak pengelola organisasi untuk mencapai tujuan bersama dengan memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Dalam arti lain, manajemen adalah pengelolaan usaha, kepengurusan, ketatalaksanaan, penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam secara efektif untuk mencapai sasaran organisasi yang diinginkan. Sedangkan dalam kegiatan pendidikan, manajemen dapat diartikan sebagai perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan dan evaluasi dalam kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh pengelola pendidikan untuk membentuk peserta didik yang berkualitas sesuai dengan tujuan.

Menurut Terry, manajemen adalah *proses*, yakni aktivitas yang terdiri dari empat subaktivitas yang masing-masing merupakan fungsi fundamental. Keempat subaktivitas itu yang dalam dunia manajemen dikenal sebagai POAC adalah *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (penggerakan), *Controlling* (pengawasan). Sebenarnya urutan Terry, meskipun sederhana mencakup fungsi-fungsi lainnya yang ditampilkan para ahli sebelumnya, hanya saja tidak secara eksplisit. Kelengkapan urutan versi Terry tampak pada penegasan mengenai sumber daya yang dikenal sebagai "six M" singkatan dari *Men* (manusia), *Material* (bahan), *Machines* (mesin), *Methods* (metode), *Money* (biaya), *Markets* (pasar)<sup>15</sup>.

---

digunakan sebagai pondasi dalam melaksanakan suatu program untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Oleh karena itu, manajemen termasuk sebagai ilmu dengan syarat: tersusun secara sistematis, bersifat objektif dan rasional, mempunyai prinsip tertentu, digunakan dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Manajemen sebagai suatu seni, pelaku dan pengguna manajemen adalah manusia itu sendiri, sehingga seni dalam suatu manajemen terkait dengan gagasan, pengambil keputusan dan konsep komunikasi dalam suatu kegiatan/organisasi.

<sup>14</sup> Nur Zazin, *Gerakan Menata Mutu Pendidikan "teori dan aplikasi"*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media), 2011. 28

<sup>15</sup> Mulyono, MA, *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media), 2008.19



## 2. Fungsi Manajemen

Institusi manajemen dalam dunia pendidikan merupakan sebuah lembaga yang bertugas mengantarkan peserta didik untuk menjadi manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, semua kegiatan yang dilakukan didalamnya selalu dimasukkan untuk mencapai cita-cita. Berkaitan dengan apa yang akan dilakukan dalam mencapai sebuah tujuan yang maksimal tentunya harus ada manajemen yang baik pula. Karena, manajemen merupakan sebuah pondasi yang mempunyai peran sangat urgen dalam keberlangsungan visi dan misi sebuah lembaga pendidikan atau organisasi<sup>16</sup>.

Dalam hal ini, aspek manajemen sebagaimana diungkapkan Everard dan Morris adalah menyusun arah, tujuan dan sasaran. Orientasi cita-cita yang jelas merupakan pusat bagi pendekatan-pendekatan teoritis dalam manajemen pendidikan yang bertujuan untuk memfasilitasi pembelajaran sebagai sebuah proses pembelajaran<sup>17</sup>.

Dari berbagai banyak kalangan yang mendefinisikan dan fungsi manajemen, disini fungsi manajemen dalam teorinya George R. Terry adalah Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling<sup>18</sup>.

### a. Planning

Perencanaan merupakan fungsi yang paling awal dari keseluruhan fungsi manajemen sebagaimana banyak dikemukakan oleh para ahli. Perencanaan adalah proses kegiatan yang menyiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu<sup>19</sup>.

Perencanaan pada hakekatnya adalah proses pengambilan keputusan atas sejumlah alternatif<sup>20</sup> mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang guna untuk mencapai yang dikehendaki serta pemantauan dan penilaiannya

---

<sup>16</sup> Mulyono, MA. *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*. (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008)

<sup>17</sup> Tony Bush dan Marianne Coleman, *Manajemen Strategis Kepemimpinan Pendidikan*. (Jogjakarta: IRCiSoD, 2010), 20.

<sup>18</sup> M. Manullang. *Dasar-Dasar Manajemen* (Yogyakarta: Ghadjah Muda University Press, 2006), 8.

<sup>19</sup> Drs. Ara Hidayat dan Imam Machali, *Pengelolaan Pendidikan "Konsep, Prinsip dan Aplikasi dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah"* (Bandung: Pustaka Educa, 2010) 22

<sup>20</sup> Pius A Partanto dan M. Dahlan Al-Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. (Yogyakarta: Arkola Surabaya, 1994), 23. Alternatif adalah Kemungkinan, pilihan dan cadangan

atas hasil pelaksanaannya, yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Proses adalah hubungan tiga kegiatan yang berurutan yaitu menilai situasi dan kondisi yang diinginkan (yang akan datang), dan menentukan apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai keadaan yang diinginkan<sup>21</sup>.

Berbagai batasan tentang planning dari yang sangat sederhana sampai sampai pada rumusan yang lebih rumit. Ada yang merumuskan dengan sangat sederhana, misalnya perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Pembatasan yang agak kompleks merumuskan perencanaan sebagai penetapan apa yang harus dicapai.

Dalam pandangan Islam, tentang perencanaan terhadap manajemen sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 60:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ  
 اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ  
 شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Artinya: Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)<sup>22</sup>.

Dari ayat di atas, sesungguhnya fungsi perencanaan sudah termasuk di dalamnya penetapan *Budget*. Oleh karenanya lebih tepat bila perencanaan atau planning dirumuskan sebagai penetapan tujuan, *Policy*, Prosedur, *Budget*, dan program dari suatu organisasi. Jadi, dengan fungsi planning termasuk *Budgetting* yang dimasukdkan fungsi manajemen dalam menetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi, menetapkan peraturan-perturan dan pedoman-pedoman pelaksanaan yang harus dituruti<sup>23</sup>.

<sup>21</sup> Prof. Dr. Husaini Usman, M. Pd, M.T. *Manajemen Teori Praktek dan Riset Pendidikan* (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2008), 61.

<sup>22</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 1971, Hlm 217.

<sup>23</sup> M. Manullang. *Dasar-Dasar Manajemen* (Yogyakarta: Ghadjah Muda University Press, 2006), 9-10

Planning yang mempunyai arti memilih dan menghubungkan-hubungi *kenyataan* dalam kita membayangkan dan merumuskan tindakan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dari perumusan diatas dapat kita tarik kesimpulan.<sup>24</sup>

1. Perencanaan harus didasarkan pada kenyataan, pada data dan keterangan yang konkrit tidak pada “bagaimana maunya kita” keinginan dan sebagainya.
2. Perencanaan adalah suatu pekerjaan mental yang memerlukan pemikiran, imaginasi dan kesanggupan melihat kedepan.
3. Perencanaan mengenai zaman datang dan tindakan-tindakan apa yang dapat dilakuka jika ada rintangan-rintangan tiba-tiba muncul atau kesulitan yang mengganggu kelancaran usaha.

## **b. Organizing**

Manusia adalah makhluk organisasi. Oleh karena itu, begitu ia dilahirkan kedua, ia menjadi anggota organisasi genetis yang disebut dengan anggota organisasi keluarga. Bahkan organisasi itu sudah ada sebelum kita dilahirkan karena kelahiran kita juga dari hasil perkawinan.

Pengorganisasian merupakan kegiatan dasar manajemen. Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan menyusun sumber daya yang disyaratkan dalam rencana, terutama dalam sumber daya manusia, sedemikian rupa sehingga pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dengan pengorganisasian orang-orang dapat disatukan dalam satu kelompok atau lebih untuk melakukan berbagai tugas. Dan tujuan pengorganisasian ini adalah membantu orang-orang untuk bekerja sama secara efektif dalam wadah organisasi atau lembaga.<sup>25</sup>

Organisasi merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia. Setiap hari manusia berhubungan dengan organisasinya. Walaupun pengalaman organisasi ada yang menyenangkan dan juga ada yang menjengkelkan, ada yang positif dan juga ada yang negative. Tetapi manusia tetap memerlukan organisasi. Adanya pertentangan ini sebagai konsekuensi bahwa manusia pada

<sup>24</sup> J. Panglaykim dan Hazil Tazil. *Manajemen Suatu Pengantar*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991), 78-79

<sup>25</sup> Drs. Ara Hidayat dan Imam Machali, *Pengelolaan Pendidikan “Konsep, Prinsip dan Aplikasi dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah”* (Bandung: Pustaka Educa, 2010) 26

hakekatnya tidak sama atau penuh dengan perbedaan.

Organisasi berasal dari bahasa latin *Organum* yang berarti alat, bagian, anggota badan adalah Struktur Birokrasi<sup>26</sup>.

Dengan orgazing yang dimaksud mengelompokan kegiatan yang diperlukan, yakni penetapan susunan organisasi serta tugas dan fungsi-fungsi dari setiap unit yang ada dalam organisasi, serta menetapkan kedudukan dan sifat hubungan antara masing-masing unit tersebut.

Organisasi atau pengorganisasian dapat pula dirumuskan sebagai keseluruhan aktivitas manajemen dalam mengelompokan orang-orang serta penetapan tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan mencapai terciptanya aktivitas-aktivitas yang berdaya guna dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu<sup>27</sup>.

Pengorganisasian merupakan rangkaian manajemen yang menjadi perbincangan untuk bagaimana sesuatu yang telah menjadi visi dan misi lembaga atau perusahaan dapat tercapai. Oleh karena itu, pandangan islam dalam hal ini memberikan pandangan yang sangat urgent untuk bagaimana dijadikan pijakan dalam melaksanakan manajemen, yaitu dalam Al-Qur'An surat As-Shaff ayat 4:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرصُومٌ

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh*<sup>28</sup>.

Dari ayat di atas, dapat disadari bersama bahwa dalam rangkaian manajemen tentang pengorganisasian, maka agar tujuan tersebut dapat tercapai maka pengorganisasian sangatlah dibutuhkan. Dalam suatu lembaga atau perusahaan biasanya diwujudkan dalam bagan bentuk organisasi yang kemudian dipecah menjadi beberapa jabatan yang kesemanya mempunyai tanggung jawab, wewenang, dan uraian jabatan (*Job Discription*). Semakin tinggi suatu jabatan biasanya semakin tinggi tugas, tanggung jawab dan wewenangnya. Biasanya

<sup>26</sup> Prof. Dr. Husaini Usman, M. Pd, M.T. *Manajemen Teori Praktek dan Riset Pendidikan* (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2008), 141.

<sup>27</sup> M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen* (Yogyakarta: Ghadjah Muda University Press, 2006),10.

<sup>28</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 1971, Hlm 928.

juga semakin besar penghasilannya. Dengan pembagian tugas tersebut maka pekerjaan menjadi ringan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Disinilah salah satu prinsip dari manajemen. Yaitu membagi-bagi tugas sesuai dengan keahliannya masing-masing.

### c. Actuating

Dalam sebuah organisasi atau lembaga pendidikan, tentunya manajemen haruslah dirumuskan secara serius. Dari perencanaan yang kemudian berorganisir terhadap rekrutmen atau pembagian bidang masing-masing. Maka pelaksanaan yang menjadi peran utama.

Penggerakan (*Actuating*) adalah salah satu fungsi manajemen yang berfungsi untuk merealisasikan hasil perencanaan dan pengorganisasian. Penggerakan merupakan upaya untuk menggerakkan atau mengarahkan tenaga kerja (*Man Power*) serta mendayagunakan fasilitas yang ada yang dimaksud untuk melaksanakan pekerjaan secara bersama.<sup>29</sup>

Actuating merupakan fungsi manajemen yang berhubungan dengan pelaksanaan tentang apa yang telah menjadi konsep atau rencana yang ditetapkan sebelumnya. Untuk mencapai tujuan dan hasil dari manajemen pelaksanaan menjadi peran utama dalam hal ini, karena keberhasilan dalam suatu organisasi ditentukan dengan pelaksanaan yang baik yang sesuai dengan tujuan utamanya. Dalam hal ini, sesuai dengan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 105.

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ  
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan<sup>30</sup>.

Dari ayat di atas, perencanaan yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja. Untuk itu maka dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas dan kerjasama. Semua sumber daya manusia yang

<sup>29</sup> Drs. Ara Hidayat dan Imam Machali, *Pengelolaan Pendidikan "Konsep, Prinsip dan Aplikasi dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah"* (Bandung: Pustaka Educa, 2010) 27

<sup>30</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 1971, Hlm 298

ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi dan program kerja organisasi. Pelaksanaan kerja harus sejalan dengan rencana kerja yang telah disusun. Kecuali memang ada hal-hal khusus sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Setiap SDM harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi dan peran, keahlian dan kompetensi masing-masing SDM untuk mencapai visi, misi dan program kerja organisasi yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, fungsi manajemen dalam actuating atau pelaksanaan suatu hal yang harus dipahami dengan baik oleh setiap individu organisasi atau lembaga pendidikan dalam menjalankan tugas untuk mencapai visi dan misinya.

#### d. Controlling

Pengendalian (Pengawasan) atau *Controlling* adalah bagian terakhir dari fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang dikendalikan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian itu sendiri. Kasus-kasus yang banyak terjadi dalam organisasi adalah akibat masih lemahnya pengendalian sehingga terjadilah sebagai penyimpangan antara yang direncanakan dengan yang dilaksanakan.

Pengendalian adalah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. Beda pengendalian dengan pengawasan adalah pada wewenang dari pengembangan kedua istilah tersebut. Pengendalian memiliki wewenang turun tangan yang tidak dimiliki oleh pengawas. Pengawas hanya sebatas memberi saran, sedangkan tindak lanjutnya dilakukan oleh pengendali. Jadi, pengendalian lebih luas dari pada pengawasan<sup>31</sup>. Sesuai dengan Al-Qur'an tentang pengontrolan atau *Controlling* dalam rangkaian manajemen terdapat dalam surat Al-Qaff ayat 16-18

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَحَنُوقْرُبِ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ  
الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ  
إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

Artinya: Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat

<sup>31</sup> Prof. Dr. Husaini Usman, M. Pd, M.T. *Manajemen Teori Praktek dan Riset Pendidikan* (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2008), 469.

*kepadanya daripada urat lehernya, (yaitu) ketika dua orang Malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya Malaikat Pengawas yang selalu hadir*<sup>32</sup>.

Dari ayat di atas, *Controlling* atau pengawasan yang sering disebut juga dengan pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahannya dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud mencapai tujuan yang sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dalam melaksanakan kegiatan *Controlling*, atasan mengadakan pemerinkasaan, mecocokan, serta mengusahakan agar kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

### **3. Manajemen Mutu Pendidikan**

Mutu atau *Quality* sesungguhnya merupakan sebuah konsep yang kontradiktif sebab disatu sisi mutu dapat diartikan sebagai konsep yang absolute dan disisi lain juga dapat diartikan sebagai konsep relative.

Sebagai konsep yang absolute, mutu dipahami sebagai dasar penilaian untuk kebaikan, kecantikan dan kebenaran yang memungkinkan standar tinggi rrdan tidak dapat diungguli. Dalam pemahaman seperti ini, produk-produk dianggap bermutu bila produk tersebut disebut dengan sempurna dan tidak menghemat biaya.

Sebagai konsep dasarnya, mutu adalah segala sesuatu yang dapat diperbaiki. Menurut filosofi manajemen lama, "kalau belum rusak janganlah diperbaiki". Mutu didasarkan pada konsep bahwa setiap proses dapat diperbaiki dan tidak konsep yang sempurna. Menurut filosofi manajemen yang baru, "bila tidak rusak, perbaikilah, karena bila anda tidak melakukan orang lain pasti melakukannya"<sup>33</sup>.

Salah satu dasar pemikiran yang melandasi lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang direvisi dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan baik secara eksternal maupun secara internal khususnya menghadapi tantangan pesaing global. Ada tiga pilar

<sup>32</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 1971, Hlm 852-853.

<sup>33</sup> Jerome S. Arcare. *Pendidikan Berbasis Mutu*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), 14.

kemampuan dasar yang diperhatikan agar masyarakat Indonesia dapat ikut dalam persaingan global yaitu kemampuan manajemen, kemampuan teknologi, dan kualitas sumber daya manusia, yang kesemuanya itu dapat dicapai melalui pendidikan yang bermutu. Mutu yang dimaksud bukan hanya memenuhi standar nasional tetapi juga perlu memenuhi standar internasional<sup>34</sup>.

Manajemen mutu dalam konteks pendidikan dapat diartikan sebuah cara atau metode meningkatkan performansi secara terus menerus pada hasil atau proses disebuah lembaga pendidikan dengan mendayagunakan semua sumber daya manusia dan modal yang tersedia.

Oleh karena itu, Untuk melakukan bagaimana kualitas mutu pendidikan yang diharapkan dapat mencapai hasil maksimal dari hasil pembelajaran, maka secara sederhana kita harus juga memperhatikan dan memerlukan tentang manajemen perencanaan mutu dan kebijakan mutu dalam suatu lembaga pendidikan untuk menghasilkan pendidikan yang sesuai dengan Sistem Pendidikan Nasional.

#### 4. Peningkatan Mutu Pendidikan

Mutu tidak terjadi begitu saja, ia harus direncanakan. Mutu harus menjadi bagian penting dari strategi institusi dan didekati secara sistematis dengan menggunakan proses strategis<sup>35</sup>.

Mutu yang dapat ditingkatkan dalam pendidikan adalah meliputi *Input*, *Proses*, dan *Output* pendidikan. Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Sesuatu yang dimaksud, berupa sumber daya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses.

Proses pendidikan adalah mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap keberlangsungannya proses disebut input, sedang sesuatu hasil dari proses disebut *output*. Dalam pendidikan berskala mikro (tingkat sekolah), proses yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan lembaga, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar,

---

<sup>34</sup> Drs. H. M. Nurdin Matry. *Implementasi Dasar-Dasar Manajemen Sekolah dalam Era Otonomi Daerah*. (Yogyakarta: Aksara Madani, 2008), 166-167.

<sup>35</sup> Edward Sallis. *Total Quality Manajemen in education*. "terjemah Dr. Ahmad Ali Riyadi dan Fahrurrozi, M.Ag, Manajemen Mutu Pendidikan". Jogjakarta: Penerbit IRCiSoD, 2010), 211.



dan proses monitoring dan evaluasi. Dengan catatan, proses belajar mengajar memiliki catatan bahwa proses belajar mengajar memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibandingkan dengan proses yang lain. Proses ini dikatakan bermutu jika pengkoordinasian dan penyerasian serta pemanduan input sekolah (guru, siswa, kurikulum) dilakukan secara harmonis, sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang nyaman (*Enjoy Learning*) mampu mendorong motivasi minat didik dan minat belajar, dan mampu memperdayakan peserta didik.

Output pendidikan adalah merupakan kinerja sekolah. Kinerja sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses/prilaku sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur dari kualitasnya, efektifitas, produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya, kualitas kerjanya, dan moral kerjanya.

Unsur-unsur mutu dalam pendidikan yang dapat ditingkatkan dapat diringkas dalam tabel berikut<sup>36</sup>.

**TABEL 01**  
**Unsur-Unsur Peningkatan Mutu Dalam Pendidikan**

Mutu dalam pendidikan	Pengertian	Unsur
Input	Segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk keberlangsungan proses	Sumber daya manusia: Kepala sekolah, guru, konselor, karyawan, dan peserta didik
		Sumber daya lainnya: Peralatan, perlengkapan, uang, dsb
		Perangkat lembaga: Struktur organisasi sekolah, peraturan prundang-undangan, diskripsi tugas, rencana atau program, dsb
		Harapan-harapan: Visi, misi, tujuan yang ingin dicapai oleh sokolah

<sup>36</sup> Drs. Ara Hidayat, M.Pd dan Imam Machali, M.Pd. *Pengelolaan Pendidikan "Konsep, Prinsip, dan Aplikasi dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah*. (Bandung: Pusataka Educa 2010), 302-303.

Proses	Mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain	Proses yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar, dan proses monitoring dan evaluasi
Output	Sesuatu dari hasil proses disebut atau merupakan kinerja sekolah. Kinerja sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses/prilaku sekolah	Kinerja sekolah dapat diukur dari: Kualitas, efektifitas, produktifitas, efisiensi, kualitas kerja, dan moral kerjanya

Oleh karena itu, untuk selanjutnya pemerintah melakukan perluasan dan pemerataan pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat ditempatkan pada prioritas tertinggi dalam pembangunan pendidikan. Mutu dan relevansi pendidikan tercermin dari kemampuan membentuk kecakapan (competencies) lulusan agar dapat menjadi pekerja produktif dengan upah yang lebih tinggi. Kesempatan pendidikan keahlian, keterampilan dan profesi harus besar dan merata dikaitkan dengan sentra-sentra pengembangan ekonomi industri, pendayagunaan iptek, dan peningkatan kecakapan hidup yang sesuai dengan prinsip belajar sepanjang hayat. Pendidikan dengan perspektif ekonomi secara nyata beralih fungsi menjadi mesin pencetak tenaga kerja baik pada skala local, nasional, dan Internasional.

Pelaksanaan rencana peningkatan mutu dengan mendayagunakan sumberdaya pendidikan yang tersedia semaksimal mungkin, menggunakan pengalaman-pengalaman masa lalu yang dianggap efektif, dan menggunakan teori-teori terbukti mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. Kepala sekolah dan guru bebas mengambil inisiatif dan kreatif dalam menjalankan program-program yang telah diproyeksikan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Karena itu, sekolah harus dapat melepaskan ikatan-ikatan birokratis yang banyak menghambat laju penyelenggaraan pendidikan.

Untuk menghindari berbagai penyimpangan, kepala sekolah

perlu melakukan supervisi dan monitoring terhadap kegiatan-kegiatan peningkatan mutu yang dilakukan sekolah. Kepala sekolah sebagai manajer atau pemimpin pendidikan disekolah berhak perlu memberikan bimbingan atau arahan, dukungan, dan teguran kepada guru dan tenaga lainnya jika kegiatan tidak sesuai dengan jalur-jalur yang telah ditentukan sebelumnya. Namun demikian, bimbingan dan arahan jangan sampai membuat guru dan tenaga lainnya menjadi terkekang dalam melaksanakan kegiatan sehingga kegiatan tidak mencapai sasaran<sup>37</sup>.

Dalam tataran yang sejajar, Pendidikan perspektif ekonomi akan melahirkan SDM-SDM yang berorientasi individualis (untuk eksistensi diri dalam kehidupan), materialis (kepuasan menikmati materi) dan liberalis (menganut kebebasan dalam berperilaku, berpendapat, kepemilikan dan berkeyakinan). Pada akhirnya akan membentuk generasi yang tidak memberi kontribusipositif bagi pembangunan skala bangsa yang menghantarkan kemandirian bangsa didunia Internsional. Dengan kata lain pendidikan perspektif ekonomi akan membentukgenerasi-generasi yang senantiasa mempertahankan ketergantungan bangsa ini terhadapnegara-negara maju selama kepentingan individu dan komunitasnya tidak terganggu. Bagaimana mungkin bangsa ini akan mampu bersaing secara berimbang apalagimenduduki posisi yang unggul dengan negara-negara maju.

Sehingga diperlukan langkah-langkah yang berimbang untuk mencegahnya agar mutu pendidikan Indonesia tidak terperosok ke dalam jurang yang membawa bangsa ini ke dalam keterbelakangan, kenistaan, kezaliman dan kehancuran. Untuk selanjutnya perluadanya gerakan bersama umat untuk membangun kekuatan yang berimbang tersebutdalam mewujudkan mutu pendidikan yang mampu mengeluarkan bangsa ini dari statusnegara berkembang menjadi negara mandiri secara hakiki yang menguatkan eksistensinya di kancah perpolitikan dunia Internasional.

Peningkatan mutu, dalam pembangunan pendidikan nasional akan memberikan dampak luas pada terwujudnya eksistensi insan-insan Indonesia yang lebih mandiri dan mampu bersaing di dalam konteks pergaulan yang makin mengglobalkan. Di samping itu, peningkatan

---

<sup>37</sup> Drs. Ara Hidayat, M.Pd dan Imam Machali, M.Pd. *Pengelolaan Pendidikan "Konsep, Prinsip, dan Aplikasi dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah.* (Bandung: Pustaka Eduka, 2010), 317.

mutu pendidikan, relevansi dan daya saing juga meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam arti luas. Peningkatan mutu pendidikan misalnya dapat dilihat dari terjadinya peningkatan penghayatan dana pengalaman nilai-nilai kemampuan yang meliputi:

- a) Peningkatan ketaqwaan, keimanan
- b) Berkembangnya wawasan kebangsaan
- c) Terbentuknya kepridian nasional yang tangguh
- d) prestasi akademik maupun non-akademik

Adapun peningkatan relevansi dapat diukur dari kesesuaian apa yang dipelajari di sekolah dengan tuntutan masyarakat dan lapangan kerja, serta kemampuan anak-anak bangsa ini dalam beradaptasi perubahansosial, budaya, ekonomi, maupun polotik tingkat lokal, nasional maupun global<sup>38</sup>.

## 5. Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan

Kebijakan peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksudkan dalam renstra pendidikan nasional diarahkan pada pencapaian mutu pendidikan yang semakin meningkat dan mengacu pada pada Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Standar Pendidikan Nasioanal telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang diundangkan pada tanggal 16 Mei 2005, Lembaran Negara Tahun 2005 No.14. Standar Pendidikan adalah kriteria minimal tentang Sistem Pendidikan diseluruh wilayah hukum negara kesatuan Replublik Indonesia.

Untuk itu di dalam pengembangan mutu yang terstandarisasi secara nasional adalah sebagai berikut:

- a) Standar Isi  
Standar Isi adalah runag lingkup materi yang dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kreteria tentang komptensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- b) Standar Proses

Standar Proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan

---

<sup>38</sup> Drs. H. M. Nurdin Matry. *Implementasi Dasar-Dasar Manajemen Sekolah dalam Era Otonomi Daerah*. (Yogyakarta: Aksara Madani, 2008), 17.

dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

c) Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

d) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria pendidik pra jabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Termasuk di dalamnya standar pengawasan sekolah/madrasah yang telah ditetapkan melalui Permendiknas No. 20 Tahun 2007.

e) Standar Sarana dan Prasarana

Standar sarana dan Prasarana adalah standar pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolah raga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berekreasi dan berkreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

f) Standar Pengelolaan

Standar Pengelolaan pendidikan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah adalah standar pengelolaan pendidikan untuk sekolah/madrasah yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan agar tercapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan.

g) Standar Pembiayaan

Standar Pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasional satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.

h) Standar Penilaian Pendidikan

Standar Penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian khas belajar peserta didik.

Standar dalam ketentuan minimal yang harus terpenuhi, ini berarti bahwa setiap pendidikan atau sekolah harus dapat mencapai kualitas minimal dengan standar tersebut atau lebih tinggi dari standar itu.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka pemerintah daerah perlu melakukan upaya-upaya yang kreatifitas untuk memastikan atau meyakinkan bahwa proses pendidikan yang dikelolanya akan menghasilkan *output* dan *outcome* yang bermutu (minimal sesuai standar kompetensi lulusan). Untuk mencapai standar tersebut harus ada penjaminan dan pengendalian dari semua aspek pengelolaan pendidikan. Tegasnya manajemen pendidikan dalam era otonomi daerah harus berusaha mencapai delapan standar pendidikan nasional.

Dalam penjelasan PP No. 19 Tahun 2005 dijelaskan secara rinci bahwa pada hakekatnya pendidikan dalam konteks pembangunan nasional mempunyai fungsi:

- a) Pemersatu bangsa
- b) Penyamaan kesempatan
- c) Pengembangan potensi diri.

Pendidikan diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam Negara kesatuan Replublik Indonesia (NKRI), memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga Negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dan memungkinkan bagi setiap warga Negara mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal.

Sementara itu, Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan dasar hokum penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan nasional. Undang-Undang tersebut memuat visi, misi, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, serta strategi pembangunan pendidikan nasional, untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan berdaya saing dalam kehidupan sosial.

Visi pendidikan nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memperdayagunakan semua warga Negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan yang selalu berubah.

Misi pendidikan nasional: (1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. (2) meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing dan tingkat nasional, regional, dan internasional. (3) meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan

masyarakat dan tantangan global. (4) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. (5) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan yang bermoral. (6) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar yang bersifat nasional dan global. (7) mendorong serta peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Replubik Indonesia<sup>39</sup>.

## KESIMPULAN

Manajemen sebuah teori yang digunakan sebagai landasan pijakan untuk menjalankan segala aktivitas organisasi yang telah ditentukan bersama, demi tercapainya kebersamaan visi dan misi dalam institusi lembaga pendidikan khususnya baik dalam ranah tujuan yang bersifat nasional maupun institusional itu sendiri.

Peningkatan mutu pendidikan menjadi masalah yang sangat urgen, berkaitan dengan pelanggan dari pengguna pendidikan secara langsung "peserta didik" masyarakat pada umumnya untuk terus memperbaiki, mengembangkan semua potensi yang secara kelembagaan akan difasilitasi oleh lembaga pendidikan di era otonomi daerah atau dalam konsep desentralisasi pendidikan dalam pengelolaan, pelaksanaan, pengembangan dan penentu kebijakan secara tersetruktur mulai dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi, pemerintah daerah/kota, lembaga pendidikan sampai pada kelas atau guru yang secara langsung menjadi eksekutor utama dalam proses rangkaian perjalanan pendidikan.

---

<sup>39</sup> Drs. H. M. Nurdin Matry. *Implementasi Dasar-Dasar Manajemen Sekolah dalam Era Otonomi Daerah*. (Yogyakarta: Aksarana Madani, 2008), 22-26.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Barry, Dahlan, M. dan Partanto, A, Pius. *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Arkola Surabaya
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. 1971. Depag RI
- Arcare S, Jerome, 2005. *Pendidikan Berbasis Mutu*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asmani, Ma'mul, Jamal. 2009. *Manajemen Pengelolaan dan Kepemimpinan Pendidikan*. Yogyakarta: DIVA Press.
- Bush, Tony dan Coleman, Marianne, 2010. *Manajemen Strategi Kepemimpinan Pendidikan*. Yogyakarta: Penerbit IRCiSoD.
- Habullah, 2006. *Otonomi Pendidikan "Kebijakan Otonomi Daerah Dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan"*. Jakarta: PT Remaja Grafindo.
- Hidayat, Ara dan Machali, Imam, 2010. *Pengelolaan Pendidikan "Konsep, Prinsip dan Aplikasi dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah"*. Yogyakarta: Pustaka Educa.
- Maimunah, Binti, 2009. *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Penerbit TERAS
- Manullang, 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada Unyvercity Press.
- Marty, Nurdin, 2008. *Implementasi Dasar-Dasar Manajemen Sekolah Dalam Era Otonomi Daerah*. Makasar: Aksara Madani.
- Mulyono, 2008. *Manajemen Administarisi Dan Organisasi Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sallis, Edward, 2010. *Total Quality Manajemen In Education*. "Terjemah Dr. Ahmad Ali Riyadi dan Fahrurrozi, M.Ag, Manajemen Mutu Pendidikan". Yogyakarta: Penerbit IRCiSoD.
- Tanzil, Hazil dan Panglaykim, J. "Manajemen Suatu Pengantar". Jakarta Timur: Ghalia Indonesia
- Undang-Undang RI No.20, 2003. *Sistem Pendidikan Nasional*. Bandung: Citra Umbara.
- Usman, Husaini . *Manajemen Teori Praktek dan Riset Pendidikan*. Jakarta Timr: PT. Bumi Aksara
- Zazin, Nur. *Gerakan Menata Mutu Pendidikan "teori dan aplikasi"*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media